



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI ASRIYANI
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN RADIOLOGI
3. NHK : 865378

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.320.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA GOWA, Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.220.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 442.500.000

1. MOBIL, MAZDA BIANTE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, NISSAN XTRAIL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MYO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOBIL, WULING CORTEX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.332.936



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.841.832.936

III. HUTANG

Rp. 6.611.204.717

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.230.628.219

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.